

SINERGI EKONOMI ISLAM UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN

Oleh:

Fika Fitriasari

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

e-mail: fika_fitriasari@yahoo.com

Abstrak:

Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, sebab jika tidak mampu diselesaikan maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Artikel ini membahas tentang bagaimana menanggulangi kemiskinan melalui sinergi ekonomi Islam. Ekonomi Islam secara implementatif memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat dan menegakkan keadilan ekonomi. Masing-masing sudah berjalan dan ada pada masyarakat sebagai suatu kenyataan dan jawaban alternatif dari sistem ekonomi kapitalis yang gagal. *Tadakhul addauliyah*, sangat diperlukan berupa keadaan yang kondusif untuk berkembang, perlindungan dan aturan-aturan yang berpihak pada masyarakat.

Kata kunci: Kemiskinan, Sinergi, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, sebab jika tidak mampu diselesaikan maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Penyelesaian masalah kemiskinan sangat kompleks karena penyelesaiannya harus dilakukan dari berbagai macam aspek. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Berdasarkan data BPS, presentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa, dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 diprediksi mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sehingga pada 2015 ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa.¹

Setiap orang harus mengetahui lebih jelas mengapa mereka harus menjauhi kemiskinan. Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer, menulis: Menurut pandangan Islam, tidak dapat dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam, sekalipun *Ahl Al-Dzimma* (warga negara non-Muslim), menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal) dan membujang dan "Islam" menyatakan perang terhadap "kemiskinan" dan berusaha keras untuk membendunginya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya."² Karena hal itu

¹ www.bps.go.id

² Qardhawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2002

dilakukan dalam rangka menyelamatkan aqidah, akhlak dan laku perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga dan melindungi kestabilan serta ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.

Pasca krisis ekonomi secara rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia telah semakin menurun, meskipun penurunan tersebut belum mampu terlihat secara signifikan. Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar permasalahan kemiskinan ini dapat terselesaikan, antara lain dengan kebijakan (1) Inpres Desa Tertinggal (IDT); (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan pada saat krisis; (3) PNPM Mandiri; dan banyak program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain. Dukungan dari sub-sistem selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdaya guna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam. Wacana yang telah berkembang pada saat ini adalah adanya sinergitas dalam ekonomi Islam untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Kemiskinan sebagai akibat pola relasi segala bidang sosial, politik, kultur, dan bersama-sama bidang ekonomi. Semuanya merupakan subsistem kemasyarakatan, termasuk didalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka untuk mengendalikan segala akibat dari kaitan

struktural ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan tersebut perlu dilakukan pengendalian dengan asas moral , etika, serta ajaran agama, sehingga untuk mengetahui apa yang harus dan apa yang jangan dilakukan, dan perlu dibentuk sinergi yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pengertian Kemiskinan Menurut Pandangan Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam firman-Nya:³

[أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ]

“...atau orang miskin yang sangat fakir” (QS al-Balad [90]: 16).

Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqr, berarti membutuhkan (al-ihtiyaj). Allah Swt. berfirman:

[فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ]

...lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (QS al-Qashash [28]:24).

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjanya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan. (*Nidzamul Iqtishadi fil Islam*, hlm. 236, Darul Ummah-Beirut).⁴ Pembedaan kategori ini tepat untuk menjelaskan pengertian dua pos mustahiq zakat, yakni al-fuqara (orang-orang faqir) dan al-masakiin (orang-orang miskin), sebagaimana firman-Nya dalam QS at-Taubah [9]: 60.

³Al-Qur'an

⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi fil Islam*. Daarul Ummah, 1990, hal. 210

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Sayang peradaban Barat Kapitalis, pengembangan sistem ekonomi Kapitalis, memiliki gambaran/fakta tentang kemiskinan yang berbeda-beda. Mereka menganggap bahwasannya kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena kebutuhan berkembang seiring dengan berkembang dan majunya produk-produk barang ataupun jasa, maka mereka menganggap usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Swt. berfirman:⁵

[وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]

“Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” (QS al-Baqarah [2]:233).

[أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ]

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu” (QS ath-Thalaaq [65]:6).

Rasulullah saw. bersabda:

“Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan”⁶.

Dari ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan

⁵Al-Qur'an

⁶HR Ibnu Majah

kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah Swt. *“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan”* (QS al- Baqarah [2]:268).

Dengan demikian, siapapun dan dimanapun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer)nya, yaitu sandang, pangan dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh karena itu, setiap program pemulihan ekonomi yang ditujukan mengentaskan fakir miskin, harus ditujukan kepada mereka yang tergolong pada kelompok tadi. Baik orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara yang makruf, yakni fakir, maupun yang tidak memiliki pekerjaan karena PHK atau sebab lainnya, yakni miskin.

Menurut sebagian pemikir-pemikir ekonom, kemiskinan itu ada beberapa bentuk dan hal ini terjadi di Negara-negara tak terkecuali Indonesia yang mana sebagai Negara berkembang. **1. Kemiskinan relatif**, seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut, ia berada di lapisan paling bawah. Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk miskin. Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan semacam ini. **2. Kemiskinan absolut**, dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan). Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin. Indonesia menggunakan indikator

kemiskinan jenis ini. **3. Kemiskinan kultural**, dikaitkan dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut. **4. Kemiskinan struktural**, kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan permasalahan-masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin.

Jika tolok ukur kemiskinan Islam dibandingkan dengan tolok ukur lain, maka akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolok ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tolok ukur lain. Sebab, tolok ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yaitu pangan, sandang dan pangan. Adapun tolok ukur lain umumnya hanya menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

Akar Kemiskinan

Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakannya (QS 30 Ar-Rum:40; QS 11:6). Disaat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS 67 Al-mulk:15). Setiap makhluk memiliki rizki masing-masing (QS 29 al-anbiya :60) dan mereka tidak akan kelaparan (QS 20 Thaha: 118-119). Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural; a) Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS Ar-Rum 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (QS 42:30). b) Kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS 3:180, QS 70:18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. c) Kemiskinan timbul karena

sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif dan menindas sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (QS 9:34), memakan harta anak yatim (QS 4:2, 6, 10) dan memakan harta riba (QS 2:275). d) Kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (QS 28:1-88). e) Kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba (QS 34: 14-15) atau peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negeri-nya (QS 59:8-9).

Dengan memahami akar masalah, akan lebih mudah untuk memahami fenomena kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang semakin meraja disekeliling lingkungan. Apakah bisa disimpulkan bahwa akar kemiskinan di negeri ini adalah perilaku eksploitatif akibat penerapan bunga sehingga kita setiap tahun harus menghabiskan sebagian besar anggaran negara untuk membayar bunga. Apakah akar kemiskinan di negeri ini adalah birokrasi yang korup dan pemusatan kekuasaan di tangan kekuatan politik dan pemilik modal sehingga tidak jelas lagi mana kepentingan publik dan mana kepentingan pribadi. Dan Apakah akar kemiskinan di negeri ini adalah buah dari kejahatan kita terhadap lingkungan yang kita rusak sedemikian masif dan ekstensif.

Konsep Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi Islam dalam tataran praktis maupun akademis sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syari'ah yang dikeluarkan tiap bulannya oleh bank Indonesia, juga penelitian di bidang perbankan syari'ah, mulai dari soal faktor-faktor

yang memengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syari'ah, bidang investasi syari'ah, hingga soal model pemberdayaan dana zakat di Indonesia. Oleh sebab itu ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan dalam masyarakat. Oleh sebab itu ekonomi dalam kacamata Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini, tetapi sebagai pelengkap kehidupan dan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, serta menjadi penunjang bagi pelayanan aqidah dan misi yang diemban.⁷

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang Muslim kepada Allah swt., hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan azas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.⁸

Ekonomi Islam merupakan teori ekonomi yang bersentuhan dengan nilai-nilai transendental yang terdapat dalam ajaran Islam, dan hal ini tidak terlepas dari dua pedoman pegangan umat Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dan ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan konteksnya. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang bersifat integral dan tidak terpisahkan dengan ajaran Islam secara keseluruhan maupun dengan realitas kehidupan. Landasan (prinsip-prinsip) ekonomi Islam setidaknya-tidaknya terdiri atas empat komponen yakni: tauhid (prinsip kesatuan), adil, khilafah dan tazkiyah (keseimbangan).

Ilmu Ekonomi Islam lebih terbatas daripada ilmu ekonomi modern. Terbatas karena hanya mengenai orang-orang yang mempunyai keyakinan pada ke-Esa-an Allah dan ajaran-ajaran moralnya, sebagaimana

⁷Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet 1. Jakarta: Gema Insani Press. 1997. h 3.

⁸Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet 3. Jakarta: Rajawali Press. 2004. h 264

tercermin dalam kitab al-Qur'an dan Sunnah. Juga terbatas karena suatu Negara Islam tidak bisa mendorong setiap hal termasuk ekonomi karena dalam suatu Negara Islam kegiatan-kegiatan yang tidak meningkatkan kesejahteraan manusia tidak dapat didorong, namun konsep kesejahteraan manusia itu tidak statis, dan selalu relatif pada keadaan yang berubah. Ada tiga sasaran yang ingin diwujudkan oleh sistem Ekonomi Islam yakni, (1) merealisasikan pertumbuhan ekonomi; (2) mewujudkan kesejahteraan manusia; dan (3) mengurangi perbedaan pendapatan dan pemerataan kekayaan.⁹

Ekonomi Islam berusaha untuk mengatasi ketidak merataan pendapatan dan menjalankan apa yang dinamakan "*Maqosid Syariah*".

Pemerataan kesejahteraan dan kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Pemerataan pendapatan inilah yang sebenarnya menjadi kendala besar bagi ekonomi kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kemakmuran itu seperti air yang dituangkan kedalam gelas. Bila gelas sudah penuh, maka airpun akan melimpah ke daerah disekitarnya. Namun mereka lupa, bahwa manusia yang bebas nilai tidak akan cukup dengan harta sebanyak apapun. Timbullah ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan yang semakin hari semakin besar. Ini yang menjadi salah satu tujuan ekonomi islam. Ada nilai moral yaitu Qonaah, menghindari mubadzir, tidak serakah, tidak bersifat konsumtif. Ada instrumen pemerataan seperti zakat, infaq shadaqah. Ada peran pemerintah (*tadakhul dauliyah*) yang menjaga *maqasid*, menjaga kemaslahatan orang banyak. *Maqosid Syariah* menurut al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada perlindungan keimanan mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan

⁹Muhammad Amin Suma. Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tangerang : Kholam Publishing. 2008. h 147

mereka dan kekayaan mereka . Apapun yang menjamin kelima hal ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan”.¹⁰

Sinergi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki lembaga-lembaga ekonomi yang merupakan embrio kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Ekonomi Islam dengan nilai-nilai kebenaran harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Meskipun secara sistem, lembaga ekonomi syari’ah memiliki keunggulan, sesama lembaga ekonomi dan keuangan harus bersinergi dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan seperti bangunan yang tersusun rapi, Al-Quran menyebutkan dengan istilah *ka’annahum bunyanun marshush* (seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh).

Pertumbuhan lembaga-lembaga bisnis syariah dalam ekonomi islam cukup baik di Indonesia, bagaimanapun akan menimbulkan persaingan. Persaingan tersebut sebaiknya tidak menyebabkan keretakan umat, sehingga sesama lembaga keuangan islam harus membangun sinergi yang solid dan kokoh. Sinergi bukan saja antara sesama bank syariah, tetapi juga dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* bahkan dengan lembaga Perguruan Tinggi yang mengembangkan kajian ekonomi Islam.

Institusi bank syariah dan asuransi syariah misalnya, dapat melakukan sinergi yang saling menguntungkan dan mengokohkan satu sama lain. Bank membutuhkan asuransi sebagai *back up* risiko, baik risiko kemacetan kredit, risiko kematian nasabah, jaminan kerugian dari hasil

¹⁰Umar Chapra. *The Future Of Economics, an Islamic Perspective*. 2001.

pinjaman ke bank seperti kendaraan, properti, maupun jaminan atas aset-aset bank itu sendiri. Sebaliknya asuransi membutuhkan bank sebagai instrumen transaksi nasabah, sebagai tempat deposito, dan investasi yang paling aman sekalipun sangat konservatif. Sekarang berkembang satu bentuk sinergi yang baru antara asuransi dan bank yang disebut dengan *bancassurance*.¹¹

Selain itu sinergi dapat dibangun dengan lembaga syariah lainnya seperti obligasi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, leasing syariah, BPRS, BMT, sektor riil syariah seperti MLM Syariah Ahadnet dan lembaga syariah lainnya. Sinergi Ahadnet dengan Bank Syari'ah misalnya dapat dibangun dalam bentuk penggunaan produk, tabungan dan pembiayaan. Artinya, praktisi bank syari'ah memakai produk-produk Ahadnet, atau membiayai pabrik Ahadnet. Demikian pula sebaliknya, anggota ahadnet menabung dan meminjam di bank-bank syari'ah, sehingga aliran dana ummat tetap berputar di kalangan ummat sendiri.

Membangun sinergi sesama lembaga ekonomi syari'ah harus dimulai dengan menyatukan visi, misi dan hati para praktisi ekonomi syari'ah. Menyatukan visi dan misi antar lembaga keuangan syariah sebenarnya tidak begitu sulit, karena lembaga tersebut didirikan bukan semata-mata atas pertimbangan market, tetapi pertimbangan syar'i, yaitu ingin mengembangkan sistem ekonomi syariah dan mengamalkan Islam secara kaffah yang membawa rahmat bagi semesta alam.

Tetapi yang mungkin menjadi tantangan ke depan, adalah menyatukan para pelaku bisnis syariah, dan merapatkan langkah seiring dan seirama. Forum silaturahmi dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya, antar praktisi ekonomi syariah, pakar ekonomi, dan ulama,

¹¹www.iaei-pusat.org/article/umum/membangun-sinergi-untuk-kebangkitan-ekonomi-indonesia

merupakan hal yang sangat diperlukan untuk saling merekat satu sama lain. Terbentuknya Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, merupakan wadah silaturahmi yang sangat strategis untuk membangun sinergi. Demikian pula Dewan Syari'ah Nasional - MUI, MES, Asbisindo, dan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, merupakan sarana komunikasi dan silaturahmi yang sangat diperlukan. Selama ini, gerakan ekonomi syariah yang dijalankan di Indonesia masih terpencar-pencar belum menyatu dalam satu gerak langkah yang sinergis. Untuk menyatukan langkah dan gerak tersebut dengan program yang terencana dan hasil yang terukur, maka harus disusun Arsitektur Ekonomi Islam di Indonesia.

Terbentuknya sinergi ekonomi islam tentu harus didukung oleh pemerintah. *Tadakhul addauliyah*, Intervensi pemerintah sangat menentukan maju atau tidaknya sistem ekonomi ini. Konglomerasi, pemusatan kekayaan terjadi karena "*market failure*" sistem kapitalis yang berdasarkan pasar. Ketika manusia dibiarkan bebas bersaing dalam mekanisme pasar, tanpa nilai, tanpa aturan dan intervensi pemerintah, terjadilah ekonomi darwinisme. Yang kuat akan semakin kuat, akan menguasai akses-akses perekonomian, sumber daya, sehingga terjadi pemusatan kapital. Yang lemah akan semakin lemah, dikuasai dan lain sebagainya

Penutup

Sinergi ekonomi islam diperlukan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai dan perilaku serta moral dan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dengan tidak melihat perbedaan dalam klasifikasi kehidupan masyarakat. Peran ekonomi Islam dalam menanggulangi tingkat kesenjangan sosial yaitu bahwa semua manusia yang hidup dalam masyarakat dituntut untuk bekerja (berusaha) memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan

potensi yang dimiliki, kemudian pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus diperbaiki sehingga bisa tersalurkan secara adil, pengentasan masalah kemiskinan dapat diminimalisir dengan adanya campur tangan pemerintah.

Ekonomi Islam secara implementatif memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat dan menegakkan keadilan ekonomi. Masing-masing sudah berjalan dan ada pada masyarakat sebagai suatu kenyataan dan jawaban alternatif dari sistem ekonomi kapitalis yang gagal. Tadakhul addauliyah, sangat diperlukan berupa keadaan yang kondusif untuk berkembang, perlindungan dan aturan-aturan yang berpihak pada masyarakat.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Al-Hadis

Amin Suma, Muhammad. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Tangerang : Kholam Publishing. 2008.

Chapra, Umar. *The Future Of Economics, an Islamic Perspective*. 2001.

Haneef, Aslam Muhammad. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komperatif Terpilih*. Jakarta : PT Rajawali, 2010.

HR. Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah

HR Ibnu Majah

Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 2. Jakarta: Rajawali Press. 2004.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet 1. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.

Qardhawi, Yusuf . *Teologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2002.

Taqiyuddin, an-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi fil Islam*,. Daarul Ummah,

Cetakan ke-4, 1990, hal. 210

www.bps.go.id

www.iaei-pusat.org/article/umum/membangun-sinergi-untuk-kebangkitan-ekonomi-indonesia